

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MAMBALAN, KECAMATAN GUNUNGSARI, KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nurmayanti Lola, Wahyunadi, Endang Astuti

Universitas Mataram

lolanurmayanti@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis regresi linear berganda. Populasi dalam penelitian ini adalah Seluruh Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 43 KK. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan menyebarkan kuesioner yang berisi pertanyaan tentang Pengelolaan Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan program IBM SPSS (Statistical Package for Social Science) versi 26, dengan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis (uji t dan uji F).

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel perencanaan dan pelaksanaan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Artinya, semakin baik perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa, maka semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, variabel pertanggungjawaban tidak memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial. Namun, secara simultan, ketiga variabel pengelolaan Dana Desa (perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan perlu terus ditingkatkan, serta optimalisasi pertanggungjawaban perlu dilakukan agar pengelolaan Dana Desa dapat berdampak lebih maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa, Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, Kesejahteraan Masyarakat.

ABSTRACT

This research aims to analyze the management of village funds in improving community welfare in Mambalan Village, Gunungsari Sub-district, West Lombok Regency. It employs a quantitative approach with multiple linear regression analysis techniques. The population in this research includes all heads of households in Mambalan Village. A total of 43 households were selected as samples. Data were collected through interviews, documentation, and questionnaires containing questions related to village fund management and community welfare. Data processing was conducted using IBM SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) version 26, involving validity tests, reliability tests, classical assumption tests, and hypothesis testing (t-test and F-test).

The research findings partially indicate that the planning and implementation variables have a significant influence on community welfare. This means that better planning and implementation in village fund management lead to higher levels of community welfare.

Meanwhile, the accountability variable does not have a significant partial effect. However, simultaneously, the three variables of village fund management (planning, implementation, and accountability) significantly influence community welfare. These findings highlight the importance of strengthening the aspects of planning and implementation, as well as optimizing accountability, to ensure that village fund management contributes more effectively to improving community welfare.

Keywords: Village Fund Management, Planning, Implementation, Accountability, Community Welfare.

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam sistem administrasi negara yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, desa memainkan peran sentral dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya, termasuk pengelolaan keuangan yang bersumber dari Dana Desa.

Dana Desa, yang bersumber dari APBN dan dialokasikan melalui APBD, menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif di desa. Sebagai salah satu program prioritas nasional, Dana Desa diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat, mempercepat pembangunan infrastruktur, serta memberdayakan masyarakat desa melalui peningkatan ekonomi dan sosial. Namun, pengelolaan Dana Desa yang efektif sangat bergantung pada transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.

Meskipun Dana Desa telah dikurirkan sejak 2015 dan mengalami peningkatan alokasi yang signifikan setiap tahunnya, tantangan dalam pengelolaannya masih sering kali ditemui. Berdasarkan hasil evaluasi, alokasi dana desa masih sering diprioritaskan untuk pembangunan sarana fisik dan infrastruktur, sementara pemberdayaan ekonomi masyarakat serta pengelolaan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, meskipun jumlah dana yang diterima desa terus meningkat, kontribusi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat masih perlu dievaluasi secara lebih mendalam.

Desa Mambalan, yang terletak di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, merupakan salah satu desa yang menerima alokasi Dana Desa sejak 2015. Selama tiga tahun terakhir, desa ini mengalami fluktuasi dalam alokasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD), yang berdampak pada anggaran pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada 2021, pendapatan desa mencapai Rp 1.812.258.401,54 dengan alokasi terbesar untuk pembangunan dan pemerintahan desa, serta penyertaan modal BUMDes sebesar Rp 106.000.000,00. Pada 2022, pendapatan menurun menjadi Rp 1.638.651.952,82, penurunan pendapatan ini disebabkan oleh penurunan ADD dan Bagi Hasil Pajak. Tahun 2023, terjadi peningkatan pendapatan menjadi Rp 1.668.099.460,74.

Dana Desa yang dikucurkan setiap tahun diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, di Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat masih belum diketahui secara pasti. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan memperhatikan pentingnya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat sasaran, serta pertanggungjawaban yang transparan, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat”.

2. KAJIAN PUSTAKA

Good Governance

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah menerapkan konsep Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Menurut Undang - Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No. 30 Tahun 2014 harus mampu menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance 2006 mengatakan bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan Good Governance demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan bersih. *Good Governance* diartikan sebagai tata cara suatu negara yang digunakan untuk mengelola sumber daya ekonomi dan sosial yang berorientasi pada pembangunan masyarakat demi mewujudkan pemerintahan yang baik.

Pemerintah Desa

Pemerintah desa merupakan unit pemerintahan terkecil dalam struktur negara Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai pelaksana pembangunan, karena desa berfungsi sebagai ujung tombak pemerintah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Pemerintah desa bertanggung jawab langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut (Saragih, 2019) dan (Santosa, 2020), peran desa sebagai ujung tombak pembangunan mengharuskan adanya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan profesional. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Aparatur desa memiliki tugas pokok dalam mengelola keuangan desa, terutama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang menjadi tolok ukur prioritas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan proses pengaturan dana desa yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Permendagri No. 20 Tahun 2018 secara spesifik mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, serta tertib dan disiplin anggaran (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Menurut (Haq and Muzakki, 2023), pengelolaan yang baik mampu meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan desa secara berkelanjutan. Adapun pengelolaan ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

a. Perencanaan

Berdasarkan Pasal 31 Permendagri No. 20 Tahun 2018, perencanaan keuangan desa dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang kemudian diturunkan dalam APBDes. Sekretaris desa berperan dalam menyusun rancangan APBDes, yang kemudian dibahas bersama BPD sebelum disahkan dan dievaluasi oleh Bupati atau Wali Kota. Proses ini memastikan bahwa anggaran mencerminkan prioritas dan kebutuhan masyarakat desa.

b. Pelaksanaan

Tahap ini melibatkan pelaksanaan anggaran melalui rekening kas desa. Kepala desa bertanggung jawab menunjuk kaur dan kasi sebagai pelaksana kegiatan anggaran (Pasal 43), serta memastikan kelengkapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

c. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan mencatat setiap transaksi dalam buku kas umum dan buku pembantu lainnya (Pasal 63-64). Setiap akhir bulan, buku ditutup dan laporan keuangan disampaikan kepada sekretaris desa.

d. Pelaporan

Pelaporan dilakukan secara berkala, termasuk laporan semester dan laporan realisasi kegiatan (Pasal 68). Laporan ini ditujukan kepada Bupati/Wali Kota melalui camat.

e. Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati/Wali Kota paling lambat tiga bulan setelah akhir tahun anggaran dan dipublikasikan kepada masyarakat (Pasal 70). Informasi tersebut wajib mencakup laporan realisasi anggaran, kegiatan yang belum selesai, dan sisa anggaran.

Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa harus memenuhi asas berikut:

- a. **Transparansi:** Masyarakat desa harus memiliki akses terhadap informasi anggaran dan pelaksanaan keuangan desa (Risnawati and Muhammad Siri Dangnga, 2023). Ini termasuk melalui media seperti papan informasi desa, media sosial, atau situs resmi desa.
- b. **Akuntabilitas:** Aparatur desa wajib mempertanggungjawabkan hasil pengelolaan dana sesuai tujuan pembangunan (Risnawati and Muhammad Siri Dangnga, 2023).
- c. **Partisipatif:** Masyarakat desa, melalui forum musyawarah desa, terlibat dalam penyusunan dan pengawasan anggaran.
- d. **Tertib dan Disiplin Anggaran:** Proses pengelolaan harus sesuai aturan dan siklus anggaran tahunan (1 Januari–31 Desember).

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar individu dan kelompok, baik material maupun spiritual (Badaruddin, 2012; Todaro, 2003). Menurut UU No.

11 Tahun 2019 tentang Kesejahteraan Sosial, kesejahteraan meliputi terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, dan keamanan sosial.

Indikator kesejahteraan menurut Bappenas (2000) dan BPS (2015) antara lain:

- Pendapatan: Mencerminkan daya beli dan kemampuan memenuhi kebutuhan hidup.
- Konsumsi/Pengeluaran: Rasio pengeluaran makanan dan non-makanan sebagai indikator ekonomi.
- Pendidikan: Akses dan kualitas pendidikan yang diterima.
- Kesehatan: Tingkat kesehatan dan kemudahan akses layanan kesehatan.
- Kondisi Tempat Tinggal: Kualitas bangunan rumah dan kelengkapan fasilitas dasar.
- Transportasi dan Fasilitas Umum: Kemudahan mobilitas masyarakat.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner yang diberikan kepada populasi yang diwakilkan oleh sampel yang dihitung menggunakan metode slovin sebanyak 43 responden, Teknik sampling dalam penelitian ini dilakukan secara *probaility sampling*. *Probability sampling* merupakan teknik pemilihan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi bagian dari sampel. Menurut (Sugiyono, 2018), jumlah sampel yang dianggap memadai dalam sebuah penelitian berkisar antara 30 hingga 500. Untuk penentuan sampel responden pada masing-masing dusun menggunakan teknik proportionate random sampling.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2018), Populasi merupakan wilayah generalisasi yang mencakup objek atau subjek yang memiliki karakteristik dan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan dianalisis guna memperoleh kesimpulan. Berdasarkan objek penelitian yang telah ditetapkan, maka populasi penerima manfaat dana desa dalam

penelitian ini adalah kepala keluarga di Desa Mambalan sejumlah 1.158 KK. Dalam penelitian ini, populasi terdiri dari rincian sebagai berikut.

Tabel 1 Jumlah Populasi Kepala Keluarga (KK) Setiap Dusun Desa Mambalan

No.	Dusun	Jumlah Kepala Keluarga (KK)	Jumlah KK (hasil PRS)
1.	Mambalan	534	19
2.	Buwuh	313	12
3.	Lilir Barat	176	7
4.	Batu Riti	135	5
Total		1.158	43

Sumber: Kantor Desa Mambalan, diolah 2024

Sampel Penelitian

Dalam penelitian kuantitatif, Menurut (Sugiyono, 2018) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Disini peneliti menggunakan rumus slovin untuk menentukan jumlah sampel yang akan diteliti. Rumus slovin adalah rumus yang digunakan untuk menentukan jumlah minimum sampel dari populasi yang terbatas. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan derajat kesalahan atau $\alpha = 15\%$ dengan derajat kepercayaan 85%, artinya peneliti yakin bahwa dalam mengestimasi parameter populasi tingkat kebenaran 85%. Alasan peneliti menggunakan $\alpha = 15\%$ karena populasi penelitian ini bersifat homogen, sehingga variasi jawaban relatif kecil. Selain itu, karena adanya keterbatasan waktu, biaya dan sumber daya lainnya dalam melakukan penelitian.

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

- n = Ukuran sampel/jumlah responden
- N = Jumlah KK (Kartu Keluarga)
- e = Persentase kesalahan (15%)

$$n = \frac{1.158}{1 + 1.158 (0.15)^2}$$

$$n = \frac{1.158}{27.055} = 42,80$$

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, peneliti membulatkan sampel yang akan diteliti menjadi 43 narasumber. Teknik sampling dalam penelitian ini dilakukan secara *probaility sampling*. *Probability sampling* merupakan teknik pemilihan sampel yang memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih menjadi bagian dari sampel. Menurut (Sugiyono, 2018), jumlah sampel yang dianggap memadai dalam sebuah penelitian berkisar antara 30 hingga 500. Untuk penentuan sampel responden pada masing-masing dusun menggunakan teknik *proportionate random sampling*.

Rumus proportionate random sampling

$$n_h = \frac{N_h}{N} n$$

Keterangan:

n_h = jumlah sampel

N_h = jumlah anggota

N = jumlah total populasi

n = total jumlah sampel yang diinginkan (43)

Penentuan sampel responden pada masing-masing dusun menggunakan teknik *proporsional random sampling*. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 1.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda dengan menggunakan program IBM SPSS (*Statistical Package for Social Science*) versi 26. Adapun persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Kesejahteraan Masyarakat

X_1 = Perencanaan

X_2 = Pelaksanaan

X_3 = Pertanggungjawaban

a = Konstanta

e = error term

b1, b2, b3 = Koefisien Regresi untuk masing-masing variabel X1, X2 dan X3

Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan batasan-batasan yang diberikan oleh peneliti terhadap variabel peneliti itu sendiri sehingga variabel peneliti tersebut dapat diukur. Variabel merupakan faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengujian dengan menggunakan data variabel yaitu variabel independen dan dependen.

Tabel 2 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala
Pengelolaan Dana Desa (X)	Dana desa merupakan dana yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang dialokasikan untuk desa, yang kemudian ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat (Lisda Van Gobel, 2023).	1. Perencanaan 2. Pelaksanaan 3. Pertanggung jawaban	Likert

Variabel	Deskripsi	Indikator	Skala
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	Kesejahteraan masyarakat merupakan sebuah kondisi yang menggambarkan situasi kehidupan masyarakat yang tercermin dari standar kehidupan masyarakat (Badaruddin, 2012).	1. Pendapatan 2. Pengeluaran 3. Fasilitas dan tempat tinggal 4. Pendidikan 5. kesehatan	Likert

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Responden yang dianalisis dalam penelitian ini berjumlah 43 orang. Penyajian data mengenai identitas responden yaitu untuk memberikan gambaran tentang keadaan diri responden. Sedangkan prosedurnya dengan jalan menyebarkan kuesioner dan meminta masyarakat mengisi kuesioner. Adapun gambaran tentang responden yang menjadi populasi dalam penelitian ini dikalsifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan usia. Berikut ini akan dibahas mengenai kondisi dari masing-masing klasifikasi demografis responden dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 3 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	28	65,12%
2.	Perempuan	15	34,88%
Total Responden		43	100%

Sumber: Hasil olah data spss 26

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa dari data responden berdasarkan jenis kelamin mayoritas laki-laki sebanyak 28 orang dengan persentase sebesar 65,12%. Sementara itu terdapat 15 orang dengan persentase 34,88% adalah perempuan. Dari total keseluruhan responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu sebanyak 43 responden.

Identitas Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4 Identitas Responden Berdasarkan Usia

No.	Usia	Jumlah	Persentase
1.	21-30 Tahun	12	27,91%
2.	31-40 Tahun	8	18,6%
3.	>40 Tahun	23	53,49%
Total		43	100%

Sumber: Hasil olah data spss 26

Berdasarkan tabel diatas menunjukan bahwa dari data responden berdasarkan usia terdapat usia 21-30 tahun sebanyak 12 orang dengan persentase 27,91%, usia 31-40 Tahun sebanyak 8 orang dengan persentase 18,6%, usia lebih dari 40 tahun sebanyak 23 orang dengan persentase 53,49% orang dari total keseluruhan sampel dalam penelitian ini sebanyak 43 responden.

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.046	2.307		-.453	.653		
Perencanaan (X1)	.258	.098	.331	2.631	.012	.409	2.443
Pelaksanaan (X2)	.693	.119	.554	5.815	.000	.712	1.404
Pertanggungjawaban (X3)	.106	.108	.125	.989	.329	.406	2.462

a. Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat (Y)

Berdasarkan hasil dapat diperoleh nilai *constant* (β_0) sebesar -1.046, sedangkan nilai koefisien (β_1) sebesar 0,258. Berdasarkan dari hasil perhitungan dari Analisis Regresi Berganda, dirumuskan bahwa model persamaan regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$Y = -1.046 + 0,258X_1 + 0,693X_2 + 0,106X_3 + 15\%$$

Rumusan model regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai konstanta sebesar -1.046 dalam model regresi menunjukkan bahwa jika variabel perencanaan (X1), pelaksanaan (X2), dan pertanggungjawaban (X3) dalam pengelolaan dana desa tidak dilakukan atau bernilai nol (0), maka kesejahteraan masyarakat (Y) akan memiliki nilai negatif sebesar -1.046. Hal ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya perencanaan yang matang, pengelolaan yang efektif, dan pertanggungjawaban yang transparan, kesejahteraan masyarakat cenderung menurun atau tidak mengalami peningkatan yang signifikan. Hasil regresi ini menunjukkan bahwa tanpa pengelolaan dana desa yang baik, kesejahteraan masyarakat akan berada pada kondisi yang kurang optimal atau bahkan mengalami dampak negatif.

Koefisien regresi variabel perencanaan (X1) sebesar 0,258. Variabel perencanaan (X1) menunjukkan hubungan yang bersifat positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Artinya, setiap peningkatan dalam perencanaan akan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika perencanaan mengalami penurunan, maka kesejahteraan masyarakat juga cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan bahwa perencanaan yang dilakukan dengan baik dalam pengelolaan dana desa memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, sedangkan perencanaan yang kurang optimal dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Koefisien regresi variabel pelaksanaan (X2) sebesar 0,693. Variabel pelaksanaan (X2) menunjukkan adanya hubungan yang bersifat positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Artinya, semakin baik pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa, maka kesejahteraan masyarakat cenderung mengalami peningkatan yang signifikan. Sebaliknya, apabila pelaksanaan tidak berjalan secara optimal atau mengalami penurunan kualitas, maka kesejahteraan masyarakat berpotensi ikut menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan yang efektif dan efisien berperan penting dalam mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Koefisien regresi variabel pertanggungjawaban (X3) sebesar 0,106. Variabel pertanggungjawaban (X3) menunjukkan adanya hubungan yang bersifat positif terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Artinya, peningkatan dalam aspek pertanggungjawaban akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, jika pertanggungjawaban mengalami penurunan, maka kesejahteraan masyarakat juga cenderung menurun. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban pengelolaan dana desa memberikan kontribusi positif terhadap

kesejahteraan masyarakat, meskipun pengaruhnya relatif lebih kecil dibandingkan dengan variabel lainnya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pertanggungjawaban tetap penting untuk memastikan pengelolaan dana desa berjalan secara baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Koefisien Determinasi

Hasil dari nilai koefisien determinasi (Adjusted R Square) sebesar 0,73. Hasil tersebut disimpulkan bahwa variabel independen memiliki kapasitas dalam menjelaskan variabel dependen sebesar 73% dan 27% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel penelitian ini.

Uji Hipotesis

1. Uji Statistik T (Uji Parsial)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas (X) secara tunggal berpengaruh terhadap variabel terikat Y dengan membandingkan antara nilai t hitung masing-masing variabel bebas. Adapun nilai t tabel dapat dihitung dengan $df = n - k - 1$, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel bebas. Maka $df = 43 - 3 - 1 = 39$, dengan nilai df 39 dan $\alpha = 5\%$ maka didapatkan t tabel sebesar 2,0227. Hasil uji t dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 6 Uji Statistik T

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-1.046	2.307		-.453	.653		
Perencanaan (X1)	.258	.098	.331	2.631	.012	.409	2.443
Pelaksanaan (X2)	.693	.119	.554	5.815	.000	.712	1.404
Pertanggungjawaban (X3)	.106	.108	.125	.989	.329	.406	2.462

a. Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat (Y)

Sumber: Output SPSS diolah 2025

a. Perencanaan terhadap kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan tabel 6 menjelaskan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh perencanaan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah sebesar $0,012 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $2,631 > t$ tabel $2,0227$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Artinya variabel perencanaan (X_1) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y).

b. Pelaksanaan terhadap kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan tabel 6 menjelaskan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh pelaksanaan terhadap kesejahteraan masyarakat adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $5,815 > t$ tabel $2,0227$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak. Artinya variabel pelaksanaan (X_2) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y).

c. Pertanggungjawaban terhadap kesejahteraan masyarakat

Berdasarkan tabel 6 menjelaskan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh pertanggungjawaban terhadap kesejahteraan masyarakat adalah sebesar $0,329 > 0,05$ dan nilai t hitung sebesar $0,989 < t$ tabel $2,0227$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa H_1 ditolak dan H_0 diterima. Artinya variabel pertanggungjawaban (X_3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y).

2. Uji F (Uji Simultan)

Variabel dikatakan berpengaruh secara simultan apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ dan nilai $Sig < 0,05$. Adapun nilai F_{tabel} dihitung dengan ketentuan $df_1 = k - 1$ dan $df_2 = n - k$, dimana k adalah jumlah variabel bebas sedangkan n adalah jumlah sampel. $df_1 = 3 - 1 = 2$ dan $df_2 = 43 - 3 - 1 = 39$, dengan $df_1 = 2$ dan $df_2 = 39$, maka didapatkan nilai F_{tabel} sebesar $3,238$. Hasil uji f dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 6 berikut:

Tabel 7 Uji F Statistik

ANOVA

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	270.962	3	90.321	38.516	.000b
Residual	91.456	39	2.345		
Total	362.419	42			

a. Dependent Variable: Kesejahteraan_Masyarakat (Y)

b. Predictors: (Constant), Pertanggungjawaban (X3), Pelaksanaan (X2), Perencanaan (X1)

Sumber: Output SPSS diolah 2025

Berdasarkan pada tabel 7 menjelaskan bahwa nilai signifikansi untuk pengaruh perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F hitung sebesar $38,516 > f$ tabel $3,238$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, hipotesis nol (H_0) ditolak, dan hipotesis alternatif (H_1) diterima. Diduga terdapat pengaruh Pengelolaan dana desa secara parsial dan simultan terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Mambalan.

Pembahasan

1. Pengelolaan Dana Desa (Perencanaan (X1)) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mambalan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dalam regresi model ini, diperoleh nilai t hitung sebesar $2,631 > t$ tabel $2,0227$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,012 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan (X1) pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Dengan kata lain, semakin baik perencanaan yang dilakukan, semakin tinggi kesejahteraan masyarakat yang dapat dicapai. Perencanaan yang efektif memungkinkan penggunaan dana desa yang lebih optimal dan program pembangunan yang lebih tepat sasaran. Jika proses perencanaan tidak dilakukan secara sistematis, maka efektivitas penggunaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan berkurang. Hal ini sejalan dengan kondisi di Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat di mana perencanaan yang baik berperan penting dalam pengelolaan dana desa. Pemerintah desa yang mampu menyusun rencana pembangunan dengan baik dapat meningkatkan kualitas layanan publik, infrastruktur, serta program pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga desa.

2. Pengelolaan Dana Desa (Pelaksanaan (X2)) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mambalan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dalam regresi model ini, diperoleh nilai t hitung sebesar $5,815 > t$ tabel $2,0227$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan (X_2) pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Dengan kata lain, Semakin baik pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, semakin besar dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat. Pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa yang efektif mencerminkan bagaimana dana desa dikelola, digunakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Jika pelaksanaan dilakukan dengan baik, maka program pembangunan desa dapat berjalan optimal, meningkatkan infrastruktur, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, pelaksanaan pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ketepatan waktu dalam realisasi anggaran, efisiensi penggunaan dana, serta pengawasan yang baik menjadi aspek penting dalam memastikan bahwa pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

3. Pengelolaan Dana Desa (Pertanggungjawaban (X_3)) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mambalan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dalam regresi model ini, diperoleh nilai t hitung sebesar $0,989 < t$ tabel $2,0227$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,329 > 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban (X_3) Pengelolaan dana desa tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y). Artinya bahwa meskipun pertanggungjawaban merupakan bagian penting dalam sistem pengelolaan keuangan desa, namun dalam konteks penelitian ini, aspek tersebut belum memberikan dampak langsung yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena pertanggungjawaban lebih berfokus pada aspek administrasi dan kepatuhan terhadap regulasi dibandingkan dengan dampak nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Di Desa Mambalan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa sudah dijalankan sesuai prosedur, namun belum cukup memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat belum sepenuhnya terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi penggunaan dana desa, atau transparansi dalam

pertanggungjawaban belum sepenuhnya disosialisasikan sehingga manfaatnya belum benar-benar terasa oleh warga desa.

4. Pengelolaan Dana Desa (Perencanaan, Pelaksanaan dan pertanggungjawaban) terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mambalan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dalam regresi model ini, diperoleh nilai F hitung sebesar $38,516 > f \text{ tabel } 3,238$ dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa (perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban) berpengaruh secara signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengelolaan Dana Desa (Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban) secara parsial terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dalam penelitian ini Pengelolaan Dana Desa yang terdiri dari Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban memiliki pengaruh yang berbeda terhadap kesejahteraan masyarakat jika diuji secara parsial. Hasil analisis menunjukkan bahwa Perencanaan dan Pelaksanaan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, yang berarti bahwa perencanaan yang matang dan pelaksanaan yang efektif dalam Pengelolaan Dana Desa dapat meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. Namun, variabel Pertanggungjawaban tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat, yang mengindikasikan bahwa dalam konteks penelitian ini, aspek Pertanggungjawaban belum menjadi faktor utama yang secara langsung memengaruhi Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dalam meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, faktor perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan dana desa lebih dominan dibandingkan dengan pertanggungjawaban, sehingga diperlukan optimalisasi dalam aspek pertanggungjawaban agar dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi masyarakat.

2. Pengelolaan Dana Desa (Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban) secara simultan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dalam penelitian ini variabel Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa Perencanaan dan Pelaksanaan yang baik dalam pengelolaan keuangan desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, berdasarkan hasil uji parsial, hanya variabel Perencanaan dan Pelaksanaan yang berpengaruh signifikan, sementara variabel Pertanggungjawaban tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. Artinya, meskipun Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan dana desa tetap diperlukan, namun dalam konteks penelitian ini, faktor tersebut belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Saran

1. Diharapkan bagi pemerintah desa untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan program dengan melibatkan masyarakat secara aktif agar program sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, meskipun pertanggungjawaban belum berpengaruh signifikan, transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengawasan tetap harus diperkuat. Evaluasi dan monitoring program secara berkala juga penting untuk memastikan efektivitas kebijakan yang diharapkan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
2. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambah sampel dan variabel lain yang juga berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, seperti inovasi desa atau kebijakan pemerintan desa maupun daerah. Selain itu, metode penelitian dapat diperluas dengan pendekatan kualitatif untuk menfapatkan pemahaman yang lebih mendalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan. Sampel penelitian juga bisa diperbesar agar hasil penelitian lebih *generalizable*.

DAFTAR PUSTAKA

- Badaruddin, R. (2012) 'Ekonomika Otonomi Daerah'.
- Faisal (2009) 'Jalan Terjal Good Governance: Prinsip, Konsep dan Tantangan Dalam Negara Hukum'.
- Ghozali Imam (2011) 'Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25 (Sembilan)', *Semarang, Universitas Diponegoro*, p. 490.
- Gunungsariobar (2022) Jumlah Desa. Available at: <https://gunungsari.lombokbaratkab.go.id/menu/jumlah-desa/> (Accessed: 18 November 2024).
- Haq, A.F. and Muzakki, K. (2023) 'Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018', *Nusantara Entrepreneurship and Management Review*, 1(1), pp. 1–10. doi:10.55732/nemr.v1i1.1041.
- Lisda Van Gobel, N.A.A.U.H. (2023) 'Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Tilango Kabupaten Gorontalo', *Journal Economy and Currency Study (JECS)*, 5(1), pp. 129–144. doi:10.51178/jecs.v5i1.1588.
- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (2018) 'Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa', *Physical Review B*, 72(10), pp. 1–13. Available at: [http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri No.20 TH 2018+Lampiran.pdf](http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri%20TH2018+Lampiran.pdf).
- Raden Muh Rais Permana (2024) Data Lengkap Sebaran Jumlah Desa di Indonesia pada Semester I/2024. Available at: <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-lengkap-sebaran-jumlah-desa-di-indonesia-pada-semester-i2024> (Accessed: 19 November 2024).
- Risnawati, R. and Muhammad Siri Dangnga (2023) 'Analisis Pengelolaan Keuangan Dana Desa Dalam Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Pada Desa Pasang Kabupaten Enrekang', *Journal AK-99*, 3(2), pp. 289–295. doi:10.31850/ak99.v3i2.2678.
- Santosa, A.B. (2020) 'Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Berkeadilan', *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(2), pp. 67–78.
- Saragih, R. (2019) 'Peran Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia', *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 7(1), pp. 20–32.
- Sasambo (2023) Kabupaten Lombok Barat, 2023. Available at:

<https://www.sasambo.id/id/region/kabupaten-lombok-barat> (Accessed: 27 November 2024).

Sugiyono (2018) 'Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D'.